

Efektivitas Sistem *Electronic Monitoring* dan Evaluasi (E-Monev) di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya

Mellia Seyselis

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
seyselis79@gmail.com

Galih Wahyu Pradana

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
galihpradana@unesa.ac.id

Abstrak

E-Monev merupakan salah satu instrumen pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan (PEPP) yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi hasil pemantauan (data realisasi) pelaksanaan rencana pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya telah menerapkan sistem ini setelah adanya kasus penggelapan uang oleh mantan bendahara Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya sendiri pada tahun 2016, dengan hadirnya sistem yang lebih modern diharapkan tidak akan mengulang terjadinya penyelewengan di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Proses *monitoring* dan evaluasi difasilitasi menggunakan perangkat lunak berbasis secara online yang dapat dilakukan pengaksesan melalui laman *monev.surabaya.go.id*. *E-Monev* mulai dijalankan di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya di tahun 2017 kemudian sampai sekarang masih dipergunakan. Tujuan dari adanya pelaksanaan penelitian ini adalah melakukan analisis dan mendeskripsikan keefektifan dari *e-monev* pada badan perencanaan pembangunan kota Surabaya. Penggunaan pendekatan kualitatif dan penelitian studi kepustakaan (*library research*) dimanfaatkan dalam penelitian ini yang mana data-data yang dimuat berasal dari literatur-literatur terkait dengan topik penelitian seperti jurnal, buku, skripsi, dan berita dari *website* (internet). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem *e-monev* yang diterapkan di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya sudah berjalan dengan efektif dibuktikan dengan hasil data penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tingkat capaian keberhasilan program pembangunan, persentase produk hukum yang di selesaikan, juga rata-rata penyerapan anggaran yang meningkat. Saran dari penelitian ini adalah memperbaiki *interface* aplikasi, melakukan pelatihan penggunaan sistem yang lebih masif dan melakukan pemeliharaan sistem secara rutin supaya dapat terus berfungsi dengan maksimal.

Kata Kunci: *E-Government*, Efektivitas Sistem, *E-Monev*.

Abstract

E-Monev is one of the development monitoring, evaluation and control instruments which used to collect data and information on the results of monitoring (data realization) on the implementation of development plans. The *e-monev* at government's development planning agency of Surabaya is implemented this system after a diversion of funds by the former of The government's development planning agency of Surabaya treasurer, the *e-monev* is expected to prevent from insident recurring. The process is facilitated using online application accessed through the *monev.surabaya.go.id* website. *E-Monev* implemented at the the government's development planning agency of Surabaya in 2017 and still continues to this day. The purpose of this research is to analyze and describe the effectiveness of *e-monev* at the Surabaya city development planning agency. The use of qualitative approach and library research in this research where the data that published from literature such as journals, books, theses, and news from website (internet). Based on the research results, it is known that *e-monev* system which implemented at The government's development planning agency of Surabaya has been running effectively as evidenced by the results data on the evaluation of the Performance Accountability System of Government Agencies, the level of achievement of the success of the development program, the percentage of legal products that have been completed, also the increased average absorption of the budget. Suggestions from this research are to improve the application interface, conduct training on more massive system use and carry out routine system maintenance so it can continue to function optimally.

Keywords: *E-Government*, System Effectiveness, *E-Monev*

PENDAHULUAN

Teknologi informasi yang terdiri atas komputer serta berbagai perangkat telekomunikasi lainnya telah mengalami perkembangan yang semakin sangat pesat hingga saat ini. Mulai dari data-data, pengetahuan, maupun keterangan-keterangan sebagai suatu informasi bisa secara cepat tersebar menuju berbagai bagian pada seluruh pelosok wilayah hanya dengan waktu yang singkat. Pada bagian ini artinya jika tiap-tiap orang yang bertempat tinggal hampir seluruh bagian dunia bisa melakukan komunikasi satu sama lain dengan cara langsung terhadap individu lainnya yang diinginkan dengan tidak butuh suatu perantaranya (Hartana, 2015). Teknologi informasi merupakan sebuah media dan infrastruktur (*hardware, software, human-ware*), sistem dan metode untuk menerima, mengirim, mengatur, dan menggunakan data agar fungsi data dapat didapatkan secara maksimal (Ramdhani et al., 2018). Perkembangan teknologi tersebut telah menempatkannya pada posisi yang penting. Pertumbuhannya juga telah dimanfaatkan di berbagai sektor kehidupan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, transportasi, industri, pariwisata, dan masih banyak lagi (Oktariyanda & Rahaju, 2018). Perkembangan teknologi ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah di masa modern, komunikasi sampai pada teknologi informasi di bagian pemerintah dapat menjadi sesuatu yang memberikan pengaruh pada peningkatan performa pemerintahan. Pengimplementasian dari teknologi informasi dibutuhkan dengan bermula pada tahapan merencanakan, melaksanakan hingga mengawasi berbagai kegiatan pembangunan yang diselenggarakan pada berbagai bagian (Fanida, Eva Hany & Karuniawati, 2010).

Akuntabilitas dan transparansi adalah suatu persyaratan bagi instansi bagian publik agar bisa dipercayai secara luas oleh masyarakat, melalui penggunaan teknologi informasi yang terpenuhi dengan diterapkannya *electronic government* dimana penerapan *e-government* ini adalah suatu wujud keterukaan atau transparansi pemerintah terhadap publik (Syafriyani & Zaituna, 2019). Saeed dan Alkuwaiti (Saeed & Alkuwaiti, 2020) menyatakan bahwa, “*The section highlights smart government benefits and the way it can effectively meet customers’ needs. The analysis indicates certain parameters or features of smart government that relates to its effectiveness and ability to offer enhanced public service to the customers by the application of technologies.*” Oleh karena itu *e-gov* di dalam perkembangan pemerintahan menjadi penting dan

dalam proses pemerintahan. Implementasi *e-gov* di Indonesia bervariasi mulai dari yang berbasis *website* hingga aplikasi (Yuyun et al., 2019). Sejumlah contoh dari fungsi pemerintahan yang memiliki penyelenggaraan dengan bantuan oleh sistem elektronik diantaranya yakni layanan kemasyarakatan, layanan bagi pegawai serta berbagai layanan yang lain sebagainya. Sementara wewenang dari pemerintahan bagian provinsi maupun kabupaten atau kota yang berkaitan terhadap pelayanan yakni pengelolaan layanan terhadap bagian tenaga kerja, penduduk, pertahanan, pencatatan sipil, layanan administratif, serta layanan administrasi pemerintah secara umum (Yunita & Aprianto, 2018).

Mau tidak mau pemerintah harus bisa berinovasi, inovasi dengan sendirinya bukan harus melakukan penemuan terhadap hal-hal yang terbaru, namun bisa berupa sebuah pendekatan terbaru yang memiliki sifat secara konteks pada artian menginovasi bukan sebatas melalui sesuatu yang belum tersedia lalu ditemukan penggagasan kemudian mempraktikkan inovasi, namun bisa berbentuk inovasi yang dihasilkan melalui pelebaran dengan meningkatkan mutu untuk menginovasi ketersediaan yang sudah ada (Jalma & Putera, 2019). Salah satu inovasi pemerintah daerah diterapkan di bidang *monitoring* dan evaluasi. Definisi *monitoring* secara mendasar berprinsip pada penggunaan yang serupa yakni bahwa *monitoring* merupakan pengawasan yang dilakukan berkelanjutan pada fungsi aktivitas terhadap kontekstual berbagai jadwal-jadwal ketika melaksanakan serta dalam menggunakan masukkan aktivitas dari organisasi pada kontekstual melalui ekspektasi yang sudah dirancang sebelumnya (Fauzia, 2018). Sedangkan evaluasi, Fournier (Mthethwa & Jili, 2019) menyatakan bahwa evaluasi merupakan salah satu bentuk penerapan dalam pemeriksaan tahapan untuk mengumpulkan maupun menyusun bukti-bukti berdasarkan hal-hal yang penting disertai keefektifan, keefisienan, serta berbagai nilai dari bermacam-macam intervensi. Terkait dengan *monitoring* dan evaluasi tersebut salah satu instansi yang menerapkan sistem di bidang *monitoring* dan evaluasi dengan sistem aplikasi yang dikenal sebagai *Electronic Monitoring* dan Evaluasi (*E-Monev*) adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya. *Monitoring* dan evaluasi berperan penting dalam peningkatan performa atau kinerja pegawai dan meminimalisir terjadinya penyelewengan tugas maupun wewenang (Ostasius & Laukaitis, 2015).

E-monev berawal dengan penuntutan supaya penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan agenda pemerintah dapat memanfaatkan media

elektronik. Pemerintahan di Indonesia sudah melakukan penancangan terhadap *e-gov* mulai dari tahun 2003 melalui pengeluaran Inpres No. 3 Tahun 2002. Pada Inpres tersebut memiliki aturan terhadap sistem informasi pemerintah atau *e-gov* dalam mengukuhkan berbagai komitmen melalui tiap-tiap perangkat negara yang berkaitan (Azhar, 2016). Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan (PEPP) membantu memastikan pencapaian tujuan pembangunan. Komninos dan Bratsas (Komninos et al., 2016) mengungkapkan bahwa pengklasteran dari pengaplikasian perangkat lunak yang mengalamatkan kebutuhan-kebutuhan mendasar di tengah perkotaan yang menjadi bagian penting untuk membentuk suatu wilayah yang besar, terutama dalam membentuk intelegensi dapat bergantung pada kreativitas, keahlian-keahlian secara digital, dan mempelajari berbagai tahapan-tahapan yang meningkatkan kapabilitas dari masyarakatnya. PEPP secara legal diatur melalui PP Nomor 39 Tahun 2009 mengenai Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Pemerintah Pusat, 2006). Perangkat lunak *e-monev* menjadi salah satu instrumen PEPP yang berfungsi menghimpun data serta informasi hasil pemantauan (data realisasi) dari implementasi rencana pembangunan. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)/OPD (Organisasi Perangkat Daerah), melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Lalu pada Pasal 5-8 menyatakan bahwa Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi, Kabupaten, Kota serta kepala SKPD/OPD membuat laporan triwulanan atas implementasi dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Laporan triwulanan ini dilaksanakan pada waktu tiap tiga bulan satu kali yang mana pada jangka waktu setahun terdapat sebanyak empat laporan triwulanan. Dalam waktu yang tergolong singkat untuk laporan yang bersifat kompleks dan rumit tersebut apabila dilaksanakan dengan manual tanpa menggunakan inovasi teknologi maka mengolah data akan lama dan memungkinkan terjadi banyak kesalahan (*human error*) dalam proses pengolahan data (Wrihatnolo, 2018).

Tujuan adanya sistem *e-monev* ini untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja satuan yang telah tersedia sebelumnya dapat mengalami peningkatan yang semakin baik. Caranya melalui pembangunan terhadap sistem informasi yang dapat mempengaruhi meningkatnya performa karyawan di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Tentunya keberhasilan pencapaian tujuan atas implementasi kebijakan sistem *e-monev* ini bukan

berdiri dengan sendirinya dikarenakan berkaitan terhadap berbagai kepentingan yang lekat oleh pihak-pihak yang memiliki keterlibatan di dalamnya (Sumaryana, 2011). Pihak-pihak yang terlibat dalam hal tersebut yakni berasal dari pihak Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya serta pihak pusat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki tujuan kepentingan yang sejalan sehingga perannya dapat menentukan keberhasilan implementasi sistem *e-monev*.

Dengan adanya *e-monev* maka terjadinya penyelewengan tugas dan wewenang bisa dicegah, terutama dengan menggunakan sistem elektronik dimana adanya penyelewengan seperti penggelapan uang yang pernah terjadi pada 2016 silam yang mana dilaksanakan mantan bendahara Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya atas pemotongan pajak PPH pegawai honorer di lingkungan (Tom, 2016). Pemerintah Kota Surabaya yang tidak disetorkan ke kas negara yang membuat negara merugi hingga sebesar 1 milyar rupiah tidak terulang kembali. Adanya penyelewengan dana seperti dilaksanakan dari mantan bendahara Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya tersebut merupakan bukti bahwa *monitoring* dan evaluasi secara manual tanpa andil teknologi memiliki resiko yang cukup besar, data yang di masukkan dapat dimanipulasi dengan mudah dan tentunya hal ini akan membuat Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya merugi tak sekadar pada kurun waktu yang singkat akan tetapi turut pada kurun waktu yang lama. Berkaca dari kasus mantan bendahara Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya diatas, dapat diketahui betapa pentingnya sistem *e-monev* dalam proses *monitoring* dan evaluasi di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Tom, 2016). Dengan sistem *e-monev* yang terintegrasi dengan baik yang memiliki tingkat keamanan tinggi maka segala kecurangan atau manipulasi data dapat dihindari. Oleh karena itu sistem *e-monev* sudah mulai diterapkan mulai tahun 2017, dimana terjadi berbagai macam perubahan yang diharapkan hadir dari adanya inovasi *e-monev*. Berikut adalah data mengenai Program RPJMD yang dituangkan dalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2016-2019.

Tabel 1. Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2016-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Banyaknya RPJMD yang wajib dilakukan	58	79	102	102	102
Banyaknya	60	79	102	102	102

agenda kegiatan RKP					
---------------------	--	--	--	--	--

Sumber: RKP BAPPEKO Surabaya 2018 dan RKP BAPPEKO Surabaya 2020

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa mulai tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini tentu menjadi sebuah tantangan sekaligus bisa menjadi masalah dan kendala dalam pelaksanaan *e-monev* di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya yang mana baru mulai menerapkan sistem *e-monev* pada tahun 2017. Kenaikan jumlah program dari tahun 2016 ke tahun 2017 yang harus dilaksanakan pun cukup besar yakni sejumlah 23 program. Dengan jumlah program yang sama hingga tahun 2019 maka dengan berjalannya sistem *e-monev* yang diharapkan mampu membawa nafas baru bagi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya maka efektivitas dari sistem tersebut diuji dengan hasil yang nantinya didapatkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

Efektivitas adalah bagian yang bersifat vital dalam pencapaian hal-hal yang dituju dan sasaran yang sudah dilakukan penentuan oleh suatu lembaga maupun instansi, aktivitas maupun agenda. Efektivitas merupakan hal yang dituju dan ingin dicapai disesuaikan pada perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya secara bersama-sama (Waruwu & Masitho, 2016). Perihal tersebut bersesuaian pada pandangan yang dikemukakan oleh Mahmudi pada buku karangannya yang berjudul "Manajemen Kinerja Sektor Publik", dimana pada buku tersebut memiliki definisi terhadap efektivitas sebagai suatu ikatan dari keluaran yang dimiliki terhadap hal-hal yang dituju, makin besarnya partisipasi keluaran pada capaian hal yang dituju, dengan demikian makin efektif pula instansi, aktivitas maupun agenda yang dijalankan (Mahmudi, 2005). Sementara berdasarkan pemaparan dari Mardiasmo mengenai efektivitas yakni sebagai suatu rasio capaian dari aktivitas maupun agenda yang dihasilkan yakni berupa keluaran terhadap target yang telah menjadi ketetapan sebelumnya (Mardiasmo, 2002). Karakteristik maupun pengukuran terhadap capaian hal yang dituju memiliki keefektifan ataupun tidak, sesuai dengan pernyataan yang dipaparkan dari Siagian (Sondang, 2008) diantaranya adalah penjelasan hal-hal yang dituju dan menjadi suatu capaian, penjelasan berbagai strategi untuk mencapai hal yang dituju, tahapan menganalisis kemudian merumuskan berbagai aturan yang telah dikukuhkan, merencanakan dengan tingkat kematangan yang baik, menyusun berbagai agenda dan aktivitas secara benar,

kemampuan bekerja dengan produktif, hingga suatu sistem pengawasan dan pengendalian. Dalam efektivitas terdapat strategi diantaranya adalah ketepatan pengerjaan suatu kegiatan akan menentukan tingkat efektivitas sistem, Jarak dapat mengintegrasikan dan mengontrol nilai dari proses kegiatan untuk menentukan tingkat efektivitas sistem, serta kreativitas membuat sistem terus berkembang dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan terkini, kreativitas menunjang hasil efektivitas suatu sistem dalam jangka panjang (Asgarkhani, 2005).

Dengan permasalahan yang ada tersebut maka peneliti dapat menggali informasi dan menganalisis efektivitas sistem *e-monev* di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Dengan berbagai penjelasan diatas maka terdapat hal-hal yang menarik untuk dibahas mengenai sistem *e-monev* di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya, dengan demikian peneliti mempunyai ketertarikan pada pelaksanaan penelitian yang berjudul "**Efektivitas Sistem *Electronic Monitoring dan Evaluasi (E-Monev)* di Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya**" peneliti ingin menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana sistem *e-monev* di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ini berjalan. Peneliti juga mengharapkan bahwa setelah adanya penelitian ini maka akan dapat berguna dan mampu meningkatkan sistem *e-monev* agar menjadi lebih baik.

METODE

Pada penelitian ini memanfaatkan penggunaan penelitian yang berjenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Peneliti memilih pendekatan tersebut dikarenakan tujuan yang dimiliki yakni dalam pendeskripsian maupun penggambaran secara nyata tentang berbagai peristiwa, kondisi maupun gejala-gejala secara sosial, dan penggunaan variabel yang dimanfaatkan (Botutihe, 2017). Menurut Nana Syaodih (Sukmadinata, 2012) jenis penelitian kualitatif adalah cara penelitian yang dipergunakan dalam melakukan pengkajian terhadap berbagai fenomena-fenomena dimana peneliti merupakan instrumen yang mengkaji suatu keadaan nyata, jadi penelitian ini berpedoman pada studi dan teori yang sudah ada (Amirudin, 2018). Jenis data yang dipergunakan pada penelitian tersebut adalah 2 jenis data yakni primer serta sekunder. Data primer yaitu data-data yang didapatkan dengan melakukan pengamatan langsung pada lapangan, sementara data yang berjenis sekunder merupakan data data yang didapatkan dengan cara tidak langsung saat proses

penelitian sedang berlangsung, yaitu dapat melalui berbagai dokumen-dokumen yang tersedia, buku, kepustakaan, dan keterangan yang lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas (Maulidin, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah staf Badan Perencanaan Pembangunan di Bidang Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Sampel yang diambil adalah staf Sub Bidang Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Peneliti penggunaan metode penarikan *non probability sampling* desain yakni melalui penggunaan *purposive sampling*. Fokus dari penelitian pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Surabaya ini adalah bermacam-macam aspek efektivitas yang didasari oleh pandangan dari Muasaroh (Susanti, 2016), yang memaparkan penjelasan jika efektivitas dari sebuah agenda ataupun aktivitas apabila ditinjau melalui bermacam-macam aspek dimana berbagai aspek tersebut di antaranya ialah:

1. Aspek tugas / fungsi

Pada aspek ini yaitu sebuah instansi disebut efektif jika telah melakukan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki secara tepat. Dalam hal ini penelitian dibuat untuk mengetahui apakah dengan adanya sistem *e-monev* dapat membuat Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tujuannya.

2. Aspek rencana / program

Pada aspek ini yang dimaksud yakni perencanaan dengan diprogram, apabila keseluruhan perencanaan bisa terlaksana dengan demikian perencanaan maupun aktivitas yang dilakukan disebut memiliki keefektifan. Dalam aspek ini maka fokus penelitian pada sistem *e-monev* apakah dalam proses imlementasinya berjalan sesuai dengan apa yang telah diprogram atau direncanakan.

3. Aspek ketentuan / peraturan

Efektivitas dari sebuah aktivitas maupun agenda yang dilaksanakan turut bisa ditinjau melalui berbagai fungsi yang dijalankan ataupun tidak terhadap peraturan yang sudah ditetapkan dengan tujuan agar terjaga keberlangsungan pada setiap tahapan kegiatan. Apabila pada peraturan tersebut dilakukan secara tepat artinya ketetapan maupun aturan yang sudah diberlakukan dinyatakan memiliki keefektifan. Dengan aspek ini maka peneliti dapat mengetahui bagaimana ketentuan sistem *e-monev* yang digunakan untuk menggiring supaya proses evaluasi dan *monitoring* tetap sesuai dengan apa yang terprogram atau direncanakan.

4. Aspek tujuan / kondisi ideal

Sebuah aktivitas disebut memiliki keefektifan melalui perspektif yang dihasilkan apabila hal-hal yang dituju maupun situasi secara ideal dari aktivitas ini telah memiliki capaian. Dalam aspek ini nantinya dapat diketahui data mengenai perbandingan hasil dari penggunaan sistem *e-monev* apakah dengan adanya sistem tersebut hasil yang diberikan semakin baik atau justru sebaliknya.

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini dilaksanakan melalui penggunaan sejumlah teknik dengan studi kepustakaan. Teknik studi kepustakaan pada penelitian yakni sebuah teknik untuk mengumpulkan data disertai cara mencari, membaca, memahami dan mengkaji baik teori, data, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan *e-monev* dari jurnal, artikel ilmiah, dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, dan lain sebagainya. Metode untuk menganalisis data yang dimanfaatkan pada penelitian ini yakni pemanfaatan metode kualitatif dengan menganalisis secara interaktif, di mana mempunyai sejumlah tahapan-tahapan yang pertama proses mengumpulkan data, lalu mereduksi data tersebut, menyajikan data-data, serta yang paling akhir adalah menarik suatu simpulan berdasarkan data yang telah diproses (Rijali, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program *e-monev* di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya merupakan suatu inovasi sistem yang membantu proses monitoring dan evaluasi. Program *e-monev* berbasis aplikasi dan dapat diakses secara *online*. Aplikasi *e-monev* didesain dengan mekanisme dan pendekatan pengukuran yang berbeda. Hal ini dilakukan menyesuaikan terhadap PP Nomor 17 Tahun 2017 mengenai Sinkronisasi Proses Perencanaan Anggaran Pembangunan Nasional dan perubahan Renja-KL (Rencana Kerja Kementrian/Lembaga) dan yang sejak tahun 2017 disusun dengan menggunakan aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Aplikasi KRISNA merupakan hasil pengkolaborasi yang dihasilkan oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Kemenkeu (Kementrian Keuangan), PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), perangkat lunak KRISNA yang disusun sebagai dukungan terhadap tahapan untuk merencanakan, menganggarkan, dan melaporkan berbagai keterangan mengenai performa yang dimiliki dari tiap-tiap bagian. Perubahan paling mendasar dari kolaborasi ini adalah bahwa penyusunan Renja-KL dilakukan hingga level komponen (dan lokasi). Pengendalian akan menjadi lebih baik jika diarahkan

untuk mengendalikan komponen-komponen pembentuk output, sehingga output yang direncanakan dapat tercapai target/sasarannya. (Wrihatnolo, 2018). Dalam pengoperasian aplikasi *e-monev*, pengguna *e-monev* wajib melaporkan masalah yang tengah dihadapi. Ada sepuluh kategori masalah yang terkait dengan input dan proses pelaksanaan suatu program. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masalah anggaran, yakni apakah anggaran mengalami kekurangan, anggaran tidak ada, anggaran berlebih, anggaran mengalami kesalahan dalam proses penyusunan anggaran, dan lain sebagainya.
2. Barang/material, yakni apakah terdapat barang yang diperlukan saat pengadaan barang tidak terdapat dipasar, barang material sulit didapatkan karena jarang beredar di pasar, atau harga barang melebihi pagu anggaran.
3. Penerima manfaat, yaitu apakah tidak ada penerima manfaat, penerima manfaat tidak bisa divalidasi, atau mungkin ada penerima manfaat yang bertambah ataupun berbeda.
4. Waktu, yaitu waktu untuk memproses pengadaan yang sangat mepet dengan tenggat pemenuhan barang atau bisa karena waktu pengurusan tidak sesuai dengan target waktu pemenuhan barang, dan sebagainya.
5. Lokasi, yakni dapat dikarenakan lokasi sasaran berada di tempat yang tidak jelas, lokasi penerima manfaat yang berada di lokasi berbeda dengan yang telah direncanakan, lokasi sasaran baru atau bahkan lokasi sasaran tidak ada, lokasi sasaran bertambah, dan lain sebagainya.
6. Desain perencanaan/konsep, yaitu bisa disebabkan desain rencana/konsep yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, pedoman atau juknis tidak ada atau sedang revisi atau bahkan tidak terbit, desain yang ada tidak sesuai dengan *output* dan *outcome* yang diharapkan, ataupun karena hal yang lain.
7. Cara/metode pelaksanaan, yakni masalah yang dapat disebabkan oleh proses pelaksanaan yang terkendala regulasi, proses yang terkendala oleh kewenangan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan permasalahan metode pelaksanaan.
8. Aparatur pemerintahan, yakni hal-hal yang bisa dikarenakan sumber daya manusia yang tidak ada atau kurang, SK atau penunjukan petugas yang terlambat, hingga pimpinan yang tidak berani mengambil tindakan untuk mengambil keputusan atau merespon kejadian, dan lain sebagainya.
9. *Stakeholders* terkait, yakni bisa karena perijinan yang sangat lambat, suatu pelepasan lahan yang

terhambat, maupun masyarakat yang tidak mendukung, dan lain sebagainya.

10. Persepsi/pengendalian, yakni bisa karena pelaksana yang menafsirkan juknis berbeda, informasi atau data dari rencana dan anggaran yang diterjemahkan atau dipahami berbeda, dan lain sebagainya.

Pengguna *e-monev* wajib menuliskan rincian masalah sesuai kategori masalah yang telah dipilih dengan jelas. Ketika pengguna *e-monev* memasukkan data dalam sistem *e-monev*, maka pengguna *e-monev* diwajibkan melampirkan bukti pendukung sebagai pelengkap data yang dimasukkan dalam sistem *e-monev*. Bukti pendukung tersebut bisa berupa suatu dokumen, foto, maupun berupa video. Bukti pendukung tersebut merupakan suatu dasar untuk menjadikan data yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengklaim pencapaian/keberhasilan pelaksanaan program (Wrihatnolo, 2018).

Adanya sistem *e-monev* membantu proses pemantauan pelaksanaan program pemerintahan serta dapat memetakan permasalahan, kendala, serta tantangan yang dihadapi oleh suatu instansi dalam proses implementasi program. Sistem *e-monev* yang terstruktur dengan baik dapat memudahkan proses *monitoring* serta evaluasi dan hasil olahan data dari sistem *e-monev* lebih akuntabel dan memiliki akurasi yang tinggi. Dengan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa inovasi *e-monev* dapat meminimalisir terjadinya manipulasi data baik saat proses *entry* data maupun proses pengolahan data. Selain itu inovasi *e-monev* juga dapat membantu mempermudah dan melancarkan proses pencapaian tujuan dan pengelolaan pemerintahan di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas sistem *e-monev* di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya tentu diperlukan berbagai data yang relevan dengan teori yang peneliti pilih sehingga dapat membuktikannya secara akurat, teori ini yakni teori yang dikemukakan Muasaroh (Susanti, 2016), bahwa bahwa efektivitas bisa memiliki penjelasan jika keefektifan dari sebuah aktivitas maupun agenda yang dijalankan bisa ditinjau melalui bermacam-macam aspek diantaranya ialah aspek tugas ataupun fungsi, aspek perencanaan ataupun program, aspek ketentuan serta aturan, dan aspek tujuan ataupun situasi yang ideal. Peneliti dalam hal ini mengambil data-data dari arsip Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya yang diperbolehkan diakses oleh publik. Seperti halnya data-data yang sudah diunggah pada *website* resmi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya

hingga *website* resmi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang mana datanya dapat relevan dengan penelitian ini. Berikut adalah pembahasan berdasarkan fokus penelitian yang peneliti pilih dengan data-data yang sudah peneliti peroleh dari berbagai sumber.

a. Aspek tugas atau fungsi

Tugas dan fungsi dari instansi dengan berbagai macam peran yang mana mengemban tugas dan mendapat wewenang yang bervariasi sangat penting untuk mencapai keberhasilan dan kemajuan suatu instansi, sehingga untuk menjamin suatu program dapat berjalan efektif maka tugas dan fungsi tersebut juga harus dijalankan dengan sebaik-baiknya (Matei et al., 2007). Ketika aspek tugas dan fungsi terpenuhi maka efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan juga dapat tercapai (Sosiawan, 2008). Maka penting bagi bidang kepegawaian dalam memberikan tugas atau fungsi dari tiap SDM yang ada serta disesuaikan dengan bidang yang dikuasai, dalam hal ini penerapan *e-monev* yang disoroti adalah pegawai di bidang evaluasi (Geoffrey & Saada, 2017). Untuk penilaian menggunakan aspek tugas dan fungsi peneliti menggunakan data hasil penilaian Evaluasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari tahun ketahun untuk menunjukkan apakah dalam aspek ini penerapan sistem *E-Monev* sudah berjalan efektif atau belum. Berikut sajian data penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari tahun 2016 hingga 2019.

Tabel 2. Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2016–2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	BB	BB
2	Nilai Evaluasi SAKIP	60,02	63,08	68,86	72,47	73,47

Sumber: Bagian Organisasi BAPPEKO Surabaya

Dari data di atas dapat terlihat bahwasanya dari tahun 2016 ke tahun 2019 selalu terjadi peningkatan nilai evaluasi SAKIP. Peningkatan nilai paling tinggi yakni dari tahun 2016 ke tahun 2017 yang nilainya meningkat sebesar 5,78 dari 63,08 meningkat menjadi 68,86. Peningkatan paling rendah adalah pada tahun 2018 ke tahun 2019 yakni nilai peningkatan sebesar 1 dari 72,47 meningkat menjadi 73,47. Tingkat akuntabilitas kinerja juga tentunya selaras terus

meningkat, dimana tahun 2016 tingkat akuntabilitas kinerjanya B (Baik) kemudian mulai naik tingkat menjadi BB (Sangat Baik) di tahun 2018 dan pada tahun 2019 predikat BB tersebut dapat terus dipertahankan dengan nilai evaluasi SAKIP yang meningkat pula. Hal ini merupakan hasil data yang bagus dalam menentukan efektivitas *e-monev* dalam aspek tugas dan fungsi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil dalam mengevaluasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah atau SAKIP di Surabaya dari tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan. SAKIP sebagai suatu usaha dari instansi dalam peningkatan akuntabilitas performa pegawai di mana meliputi suatu perencanaan, pengukuran kinerja pegawai, serta evaluasi kinerja pegawai, sehingga suatu indikator yang menentukan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah ketika evaluasi SAKIP tersebut terus mengalami peningkatan (Bappeko Surabaya, 2020). Peningkatan nilai evaluasi SAKIP ini tentunya dilakukan dengan berbagai tahapan menyusun perencanaan aktivitas yang baik, hingga melaksanakan dan mengevaluasi kinerja secara bagus. Dalam hal ini untuk terus mempertahankan penilaian evaluasi SAKIP tentu bukan merupakan suatu tugas yang mudah. Oleh karena itu dapat dikatakan nilai evaluasi SAKIP ini sangat baik melihat bahwa tidak hanya mempertahankan melainkan terus terjadi peningkatan nilai evaluasi SAKIP dari tahun ke tahun. Hal ini berarti pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya sangat efektif mengingat kinerja instansi pemerintahannya juga baik.

b. Aspek Rencana/Program

Selanjutnya adalah dalam aspek rencana atau program. Perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan dalam menentukan serta mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan (Batlajery, 2016). Dalam hal ini jika program atau rencana yang telah disepakati atau ditetapkan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan maka dapat dikatakan sistem yang diterapkan untuk menjalankan program tersebut efektif (Putri, 2017). Peneliti telah menelusuri dan berhasil mendapatkan data mengenai tingkat capaian keberhasilan program pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya yang merupakan data relevan dalam menganalisis aspek rencana atau program. Berikut adalah sajian data mengenai level pencapaian kesuksesan dari aktivitas pembangunan di tahun 2016 sampai dengan 2019.

Tabel 3. Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan Tahun 2016 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	88,33 %	94,9 4%	91,18 %	98,04 %	99,02 %

Sumber : RKPD BAPPEKO Surabaya 2018 dan RKPD BAPPEKO Surabaya 2020

Dari data tersebut diketahui bahwa hampir setiap tahun terjadi peningkatan tingkat capaian keberhasilan program di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Pada tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi penurunan tingkat capaian keberhasilan program sebesar 3,76% dari 94,94% di tahun 2016 menjadi 91,18% di tahun 2017. Kemudian sejak tahun 2017 sampai pada tahun 2019 telah meningkat dan berlangsung secara pesat. Peningkatan yang sangat drastis terdapat di tahun 2017 menuju 2018 dimana tingkat capaian keberhasilan program pembangunan meningkat sebesar 6,86% yakni dari 91,18% di tahun 2017 menjadi 98,04% di tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat capaian keberhasilan program mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2019. Terjadi tingkat penurunan program dari tahun 2016 ke tahun 2017, hal ini disebabkan adanya pergantian sistem yakni penerapan pertama sistem *e-monev* serta peningkatan jumlah program dari 79 program ke 102 program sehingga wajar apabila sistem *e-monev* di awal diterapkannya dalam membantu perencanaan atau program masih belum bisa optimal. Hal ini dibuktikan bahwa setelah tahun 2017 peningkatan tingkat capaian keberhasilan program terus meningkat secara drastis bahkan di tahun 2019 mencapai nilai yang hampir sempurna yakni 99,02%. Program-program yang berhasil dilaksanakan atau tercapai di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya dapat dikatakan hampir seluruhnya dapat dicapai pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *e-monev* yang diterapkan di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya berjalan dengan efektif.

c. Aspek Ketentuan dan Peraturan

Salah satu unsur dari negara hukum adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus dilandasi oleh hukum dan juga peraturan yang berlaku (Jalaluddin, 2009). Dalam pelaksanaannya pemerintah memberikan kewenangan untuk setiap Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dalam

rangka menentukan arah dan kebijakan pembangunan serta fasilitas pendukung yang sesuai dengan kondisi daerah setempat dengan membuat produk hukum untuk menjadi landasan ketentuan setiap program yang akan dijalankan (Suharjono, 2014). Peneliti telah mengumpulkan data yang relevan untuk aspek ini, berikut sajian data yang mengenai aspek ketentuan dan peraturan adalah dengan mereduksi data persentase produk hukum yang telah di selesaikan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, berikut adalah sajian data terkait persentase produk hukum yang diselesaikan tahun 2016 hingga tahun 2019.

Tabel 4. Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2016–2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Banyaknya perancangan terhadap produk hukum	87	73	79	89	75
2	Banyaknya perancangan terhadap produk hukum yang diselesaikan	87	73	79	89	75
3	Tingkat perancangan produk hukum yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Hukum BAPPEKO Surabaya

Dari data di atas dapat diketahui bahwa persentase rancangan produk hukum yang diselesaikan selalu mencapai persentase 100%. Dalam hal ini dari tahun ke tahun perancangan produk hukum dapat terselesaikan seluruhnya. Jumlah maupun banyaknya perancangan produk hukum yang terselesaikan berbeda-beda jumlahnya dari tahun ke tahun. Dapat diketahui bahwa jumlah produk hukum yang diselesaikan paling tinggi adalah tahun 2018 dengan 89 perancangan produk hukum yang terselesaikan. Sedangkan perancangan produk hukum yang terselesaikan paling sedikit di tahun 2016 yakni berjumlah 73 rancangan produk hukum. Hasil persentase yang sempurna dapat dipertahankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya dari tahun ke tahun merupakan suatu pencapaian atas aspek ketentuan dan peraturan yang sangat baik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa produk hukum yang diselesaikan selalu mencapai persentase 100% dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Hal ini berarti keseluruhan produk hukum dapat diselesaikan setiap tahunnya dengan sempurna. Ini menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan memiliki komitmen untuk terus menegakkan ketentuan dan peraturan serta mensinkronkan produk hukum dengan peraturan perundangan di atasnya. Tentunya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya sistem *e-monev* maka dapat membantu Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya untuk dapat terus mempertahankan persentase penyelesaian produk hukum. Dapat diambil kesimpulan bahwa aspek ketentuan dan peraturan dalam menentukan efektivitas sistem *e-monev* di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya berjalan dengan efektif.

d. Aspek Tujuan dan Kondisi Ideal

Suatu program atau kegiatan dapat dikatakan efektif yakni jika tujuan dan kondisi ideal dari adanya program tersebut sudah tercapai dengan baik (Putri, 2017). Tujuan penerapan *e-gov* yang mana dalam hal ini adalah penerapan sistem *e-monev* yakni bahwa sistem tersebut dapat membuat interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan kalangan bisnis, hingga antar instansi pemerintah dapat bersahabat, nyaman, transparan, dan tidak sulit sehingga dengan hal ini segala bentuk pelaksanaan program dari perencanaan hingga hasil dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi terkait (Santoso & Hasibuan, 2005). Dengan hal itu maka sistem *e-monev* harus mampu membantu pencapaian tujuan dan kondisi ideal di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya supaya bisa membuktikan keefektifitasannya. Berikut adalah reduksi data yang relevan dalam membahas aspek tujuan dan kondisi ideal, dengan sajian data ini maka akan dapat dilihat bagaimana efektivitas sistem yang diterapkan. Peneliti mendapatkan data mengenai rata-rata penyerapan anggaran kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya

Tabel 5. Rata – Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Tahun 2016 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Rata-rata penyerapan anggaran kegiatan	74,35 %	89,29 %	87,29 %	90,19 %	95,95 %

Sumber : RKPD BAPPEKO Surabaya 2018 dan RKPD BAPPEKO Surabaya 2020

Melalui data-data tersebut bisa diketahui jika rata-rata penyerapan anggaran kegiatan di tahun 2016 hingga 2019 tidak selalu meningkat. Pada tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi penurunan tingkat capaian keberhasilan program sebesar 2% yakni dari 89,29% di tahun 2016 menjadi 87,29% di tahun 2017. Kemudian sejak tahun 2017 sampai pada tahun 2019 telah meningkat dan berlangsung secara pesat. Peningkatan yang sangat drastis terdapat di tahun 2018 menuju 2019 dimana tingkat capaian keberhasilan program pembangunan meningkat sebesar 5,76% yakni dari 90,19% di tahun 2018 menjadi 95,95% di tahun 2019. Oleh karena itu meski terjadi penurunan di tahun 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya mampu mengembalikan bahkan mengungguli hasil rata-rata penyerapan anggaran kegiatan tahun 2017. Hasil ini merupakan hasil yang positif dalam aspek tujuan dan kondisi ideal.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa rata-rata penyerapan anggaran kegiatan mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2019, Terjadi penurunan rata-rata penyerapan anggaran kegiatan pada tahun 2016 ke tahun 2017. Sekali lagi hal ini disebabkan adanya pergantian sistem yakni penerapan pertama sistem *e-monev* serta peningkatan jumlah program dari 79 program ke 102 program. Setelah tahun 2017 terjadi peningkatan terus menerus hingga tahun 2019 dimana peningkatan rata-rata penyerapan anggaran paling tinggi terjadi di tahun 2018 ke tahun 2019. Hal ini tentu memperlihatkan bahwa sistem *e-monev* yang diterapkan di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya cukup efektif dimana Tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari rata-rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga terjadinya peningkatan penyerapan anggaran kegiatan menjadi bukti konkret tingkat efektivitas sistem yang dijalankan. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan telah berjalan secara optimal. Dalam aspek tujuan dan kondisi ideal, menurut hasil data yang disajikan maka sistem *e-monev* dalam aspek ini telah berjalan dengan efektif.

Dari keempat aspek tersebut peneliti mampu menyimpulkan tingkat efektivitas sistem *e-monev* di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Hasil penelitian yang peneliti dapat dari pembahasan di atas adalah bahwa sistem *e-monev* yang sudah dijalankan sejak tahun 2017 di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya telah berjalan dengan efektif. Meski pada awal

diterapkannya sistem *e-monev* di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya hasilnya belum optimal, hal ini tentu tidak lepas dari adanya penambahan jumlah program yang cukup banyak dari tahun 2016 ke tahun 2017 yakni dari 79 program menjadi 102 program serta ditambah adanya kasus penggelapan uang oleh mantan bendahara Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya di tahun 2016 juga yang tentunya membuat penerapan sistem *e-monev* di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya di awal tahun peluncurannya mengalami kesulitan. Akan tetapi tahun-tahun selanjutnya setelah tahun 2017 tersebut, sistem *e-monev* dapat berfungsi dengan sangat baik. Performa sistem yang luar biasa tinggi telah menunjukkan bahwa dengan keberhasilan inovasi teknologi di bidang *monitoring* dan evaluasi yang diimplementasikan di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ini, maka sistem *e-monev* bisa terus dilanjutkan dan dikembangkan sehingga tingkat efektivitas sistem dapat terus meningkat. Tentunya dengan hal tersebut proses pengelolaan pemerintahan di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya juga dapat berjalan dengan lancar.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dimuat pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas sistem *e-monev* di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya sudah berjalan dengan efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari berbagai peningkatan nilai dan persentase dari berbagai aspek pengukur tingkat efektivitas sistem yang dijalankan. Sistem *e-monev* yang diterapkan semenjak tahun 2017 sempat mengalami kesulitan di tahun pertama peluncurannya dimana sempat terjadi penurunan persentase tingkat capaian keberhasilan program dan rata-rata penyerapan anggaran kegiatan. Hal ini juga merupakan dampak dari naiknya jumlah program yang harus diselesaikan dari tahun 2016 ke tahun 2017 yakni meningkat sebesar 23 program. Akan tetapi nampak bahwa perbaikan sistem tahun selanjutnya menjadi sangat baik karena terus ada peningkatan persentase maupun nilai dari berbagai aspek yakni aspek tugas atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan dan peraturan serta aspek tujuan atau kondisi ideal.

Saran

Meski sistem *e-monev* di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya sudah berjalan dengan efektif, tetap diperlukan adanya peningkatan sistem setiap tahunnya dikarenakan tuntutan dan kegiatan di kemudian hari akan selalu bertambah dan dalam hal ini tantangan akan selalu ada. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya kedepannya harus mampu mempertahankan kinerja bagus dari program atau sistem *e-monev* ini. Seperti halnya dengan peningkatan *interface* aplikasi agar meningkatkan tingkat *user friendly* sehingga permasalahan seperti *human error* yang mana merupakan permasalahan sebelum diterapkannya sistem *e-monev* dapat terhindarkan. Hal tersebut juga dapat membantu mempermudah dalam pembuatan laporan triwulanan yang sifatnya sangat kompleks menjadi lebih mudah dengan aplikasi atau sistem yang mudah digunakan. Selain itu perlu dilakukan pelatihan kepada pegawai untuk penggunaan sistem *e-monev* juga penting dilakukan agar pengguna sistem bisa memahami betul penggunaan sistem *e-monev*. Pemeliharaan sistem *e-monev* juga sebaiknya dilakukan secara rutin agar sistem dapat terus berfungsi dengan baik. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya harus terus meningkatkan sistem *e-monev* ini mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga terus berkembang sehingga di masa yang akan datang pasti banyak hal-hal baru yang tercipta dan harus terus berkembang agar tidak tertinggal. Dengan begitu maka sistem *e-monev* di Badan Perencanaan Pembangunan dapat menjadi inovasi yang fleksibel mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, A. (2018). Inovasi Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pariwisata Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 26.
- Asgarkhani, M. (2005). The Effectiveness of e-Service in Local Government: A Case Study. *The Electronic Journal of E-Government*, 3(4), 157–166.
- Azhar, M. A. (2016). *E-Monev Dalam Bingkai Reformasi Birokrasi (Studi E-Monev Keuangan Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Dalam Implementasi Reformasi Birokrasi)*. 1–11.
- Bappeko Surabaya. (2020). RKPD 2021. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Batla Jerry, S. (2016). *Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke*. (2), 135–155.

- Botutihe, N. (2017). *Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Pada Rumah Sakit Aloe Saboe Provinsi Gorontalo*. 6(2).
- Fanida, Eva Hany & Karuniawati, R. D. (2010). Effectiveness Of Electronic Conference System Development Plan (E- Musrenbang) Tambaksari District. *Administrasi Negara*, 1–11.
- Fauzia, E. (2018). Sistem Informasi Laporan Monitoring Evaluasi (MONEV) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. *Konferensi Nasional Sistem Informasi*, 8(9), 657–662.
- Geoffrey, M., & Saada, M. (2017). *Influence of monitoring and evaluation on performance of constituency development fund projects In Kajiado East Sub-County, Kenya*. (23), 12–26.
- Hartana, M. (2015). Efektivitas Penerapan E-Government dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia*, 1(2), 60–87.
- Jalaluddin. (2009). *Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik*. 1–19.
- Jalma, H., & Putera, R. E. (2019). *E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang*. 8(1).
- Komninos, N., Bratsas, C., Kakderi, C., & Tsarchopoulos, P. (2016). Smart City Ontologies: Improving the effectiveness of smart city applications. *Journal of Smart Cities*, 1(1), 31–46.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan (Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Matei, A. M., Karamoy, H., Lambey, L., Akutansi, P. M., Ekonomi, F., & Sam, U. (2007). *Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud*. (64), 86–96.
- Maulidin, M. D. (2017). *Efektivitas Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Berbasis Aplikasi E-Monev Pada Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Periode 2017 (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro)*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Mthethwa, R. M., & Jili, N. N. (2019). Challenges in implementing monitoring and evaluation (M & E) The case of the Mfolozi Municipality. *African Journal of Public Aaffaire*, 3(2), 102–113.
- Oktariyanda, T. A., & Rahaju, T. (2018). E-government strategy of Surabaya city government through e-rt / rw to improve the quality of public service. *Journal of Physics: Conference Series*, 953(1).
- Ostasius, E., & Laukaitis, A. (2015). *Reference Model for E-Government Monitoring, Evaluation and Benchmarking*. 26 No. 3.
- Pemerintah Pusat. (2006). Peraturan Pemerintah 39. *Peraturan Pemerintah No 39*.
- Putri, E. H. (2017). *Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda)*. 5, 5431–5445.
- Ramdhani, M. A., Aulawi, H., & Gojali, D. (2018). Analysis of determinant factors of e-Government implementation. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 434(1).
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81.
- Saeed, H., & Alkuwaiti, A. (2020). *Scholarworks @ UAEU Effectiveness of the Smart Government in Abu Dhabi Municipality: A Study of the Customers ' Opinion United Arab Emirates University College of Humanities and Social Sciences Department of Government and Society Effectiveness Of The SM*.
- Santoso, H. B., & Hasibuan, Z. A. (2005). *Standardisasi aplikasi e-government untuk instansi pemerintah*. 16424, 3–4.
- Sondang, S. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Binapura Aksara.
- Sosiawan, E. A. (2008). *Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Daerah Di Indonesia : Prespektif Content Dan Manajemen*. 2008(November 2007), 88–98.
- Suharjono, M. (2014). *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*. 10(19).
- Sukmadinata, N. S. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Summaryana, A. (2011). Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Efektifitas Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11, 50–58.
- Susanti. (2016). Teori Efektivitas. *Repository Unpas*, 17–43.
- Syafriyani, I., & Zaituna, Y. P. (2019). Penerapan E-

Government Dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian: Studi Di Bkpsdm Kabupaten Sumenep. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(1), 28.

Tom. (2016). *Gelapkan Pajak dan Rekayasa Perdin, Mantan Bendahara Bappeko Surabaya Ditahan*. Retrieved from www.terasjatim.com/gelapkan-pajak-dan-rekayasa-perdin-mantan-bendahara-bappeko-surabaya-ditahan/

Waruwu, H., & Masitho, B. (2016). *Efektivitas Pelayanan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan*. 4(1), 43–51.

Wrihatnolo, R. R. (2018). *e-Monev Generasi III*. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Republik Indonesia.

Yunita, N. P., & Aprianto, R. D. (2018). Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government Di Indonesia : Analisis Website. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 2018*(Sentika), 329–336.

Yuyun, E. K. S., Eprilianto, D. F., & Pradana, G. W. (2019). *Digital Inovasi Sektor Publik : Efektivitas Kolaborasi Dalam Implementasi Inovasi Desa Digital*. 10, 127–145.